

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: SEBUAH TINJAUAN EMPIRIS

Arif Widyatama

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu

Abstract: *This research aims to test and explain the Good Corporate Governance (GCG) which consists of commissioner board, independent commissioner, audit committee, managerial of property, and institutional property to the Corporate Social Responsibility in the manufactures listed in Indonesia Exchange Stock. In this moment, the study on the Corporate Social Responsibility (CSR) is needed to solve the problems caused by the less of conventional accounting. actually there are many firms focusing to gain the most profit but too much ignore to the public interest. This research is the important think to analyzed as well, based on to the more of GCG applications done by the manufacture firms listed in Indonesian Exchange Stock are not effective. Quantitative analysis is used as an approach. The firms listed in Indonesian Exchange Stock is treated as research populations for 2009–2011. The results show that the independent commissioner positively influences to the CSR disclosure, however audit committee negatively influences to the CSR disclosure, while commissioner board, whether managerial property and the institutional property do not influence to the CSR disclosure. Based on these results, the government should review the implementation of good corporate governance in terms of structure and practice to be able to run effectively.*

Keywords: *corporate social responsibility, good corporate governance, konvensional accounting, triple bottom line*

Beberapa dekade ini, akuntansi konvensional terus menuai banyak kritik. Kritik yang disampaikan bukan tanpa alasan, akuntansi konvensional dikritik karena dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan para pengguna baik internal maupun eksternal perusahaan. Argumentasi ini diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gaffikin (2006) yang mengemukakan bahwa akuntansi seharusnya terlibat dengan aspek kehidupan sosial dikarenakan pemikiran akuntansi yang dihasilkan oleh manusia seharusnya dapat membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu kritik yang muncul adalah ketika akuntansi konvensional hanya 'berpijak' pada *single bottom line*. Konsep ini memuat bahwa perusahaan ketika beroperasi jangan hanya terbatas pada maksimalisasi *shareholder* atau pemegang saham perusahaan, namun juga harus berfokus pada *stakeholder* lainnya seperti pemerintah, karyawan, dan terkhusus adalah masyarakat.

Saat ini pelaporan keuangan perusahaan hanya terbatas pada aspek keuangan guna kepentingan *shareholder* (Thompson dan Zakaria, 2004). Padahal bila ditelusuri lebih jauh, aktivitas perusahaan tidak hanya terfokus tentang menghasilkan laba, namun lebih penting dari itu fungsi perusahaan sangat luas. Perusahaan juga harus lebih memerhatikan kondisi di sekitar lingkungan perusahaan terutama masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Hal ini penting dikarenakan *stakeholder* yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan yang pertama kali ada masyarakat sekitar.

Oleh sebab itu, perlu adanya konsep *triple bottom line* yang dimiliki oleh perusahaan ketika akan beroperasi. Margolis, *et al.*, 2007 mengemukakan bahwa konsep *triple bottom line* harus dimiliki oleh perusahaan ketika menjalankan perusahaannya. Ketika perusahaan berpijak pada *triple bottom line* maka aktivitas perusahaan akan lebih berkontribusi secara luas terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan perusahaan tidak hanya dihadapkan

pada tanggung jawab untuk memaksimalkan laba, namun juga harus mempertimbangkan tanggung jawab lain seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* (CSR).

CSR merupakan sebuah konsep yang muncul dalam dekade ini untuk menutupi kelemahan akuntansi konvensional. Bilamana akuntansi konvensional hanya terbatas aspek keuangan, berbeda dengan CSR. Tsoi (2009) berpendapat bahwa CSR merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat memberikan persepsi positif mengenai keadaan perusahaan. Dengan adanya persepsi positif dari masyarakat maka secara langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan di 'mata' publik. Namun untuk menunjang keberhasilan CSR maka perlu ada beberapa variabel yang mendukung salah satunya adalah *good corporate governance* (GCG).

GCG merupakan sebuah konsep yang harus diimplementasikan oleh sebuah perusahaan guna meminimalisir bentuk-bentuk kesenjangan yang terjadi antara manajer selaku pengelola perusahaan dan investor selaku pemilik perusahaan. Di lain kesempatan terdapat sebuah definisi mengenai GCG yaitu definisi yang dikemukakan oleh OECD (2004) sebagai berikut *Corporate governance involves a set of relationship between a company's management, its board, its shareholder and other stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined*". Berdasarkan konsep tersebut maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa GCG merupakan sebuah sistem yang dimiliki perusahaan untuk mensinergikan masing-masing organ perusahaan guna mencapai tujuan.

Kaitan antara GCG sangat erat dengan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan CSR merupakan sebuah bentuk kebijakan atau sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan guna memperoleh citra positif di 'mata' masyarakat maupun *stakeholder*. Sehingga perlu adanya koordinasi antar masing-masing organ terutama hubungan antara manajemen dan *shareholder* dalam membuat keputusan tersebut. Agar terdapat hubungan yang selaras antara manajemen dan *shareholder* implementasi GCG harus dijalankan dengan baik

Penelitian ini perlu dilakukan mengingat selain penjelasan terkait fenomena di atas, juga terdapat perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh GCG terhadap CSR diantaranya hasil penelitian yang

dilakukan oleh Jo dan Harjoto (2012); Bhimani and Soonawalla (2005); Jensen (2002); dan Aguilera, *et al.*, (2007) yang memberikan bukti bahwa GCG berpengaruh positif terhadap CSR. Namun di sisi lain terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Badjuri (2011); Cahyaningsih & Martina (2011).

Penelitian ini masih perlu dilakukan secara empiris mengingat implikasi dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi *stakeholder* terutama masyarakat. *Shareholder* maupun manajemen di perusahaan manufaktur menjadi lebih sadar mengenai pentingnya implementasi GCG terhadap CSR bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu, berdasarkan rumusan masalah di atas maka rumusan penelitian ini adalah apakah GCG yang terdiri dari dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan CSR?

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan kinerja. Hubungan antara GCG dan CSR dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi. Dasar penggunaan teori ini dikarenakan adanya *conflict of interest* yang terjadi antara pihak manajemen dan *shareholder* dalam mengungkapkan CSR. Hal ini dikarenakan ketika pihak *shareholder* ingin perusahaan mengungkapkan CSR guna meningkatkan nilai saham, di sisi lain manajer menganggap bahwa hal tersebut dapat menambah biaya perusahaan sehingga pendapatan yang diperoleh perusahaan akan berkurang. Oleh sebab itu adanya implementasi GCG diharapkan dapat mengawasi kinerja manajer sehingga *conflict of interest* berkurang dan pada akhirnya pelaksanaan pengungkapan CSR dapat dilakukan dengan maksimal.

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa hubungan agensi akan muncul ketika terjadi pendelegasian wewenang oleh pemegang saham selaku pemilik perusahaan kepada manajemen. Hubungan keagenan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak yakni *shareholder* yang mewakili prinsipal dan

manajemen yang mewakili agen. Konflik kepentingan ini terjadi karena perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak terhadap perusahaan. Prinsipal sangat berharap agar agen mengelola perusahaan yang dimilikinya bekerja dengan baik, sehingga nantinya dividen yang akan diterima oleh pemilik saham akan lebih besar. Namun di sisi lain, manajer selaku agen yang bertugas untuk mengelola perusahaan seringkali bertindak tidak seperti keinginan prinsipal, bahkan seringkali manajer melakukan hal-hal yang bersifat menyimpang (*moral hazard*) sehingga perlu adanya suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengawasi tindakan manajemen agar berbuat seperti yang diharapkan oleh *shareholder*. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa baik prinsipal dan agen dianggap sebagai orang ekonomi (*homo economicus*) yang dapat melakukan hal-hal yang menyimpang dan berbuat atas kepentingan dirinya sendiri.

Pengembangan Hipotesis

Isu mengenai pentingnya pengungkapan CSR ini sangat terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*. Teori yang digunakan melandasi hubungan antara GCG yang diprosikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR adalah teori agensi. Asumsi dasar yang digunakan untuk melandasi hubungan ini adalah ketika manajer diberikan wewenang oleh *shareholder* maka membuat kecenderungan manajer untuk melakukan *moral hazard* sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan cenderung merugikan pihak *shareholder* sehingga GCG timbul untuk meminimalisir keadaan tersebut.

Tidak hanya mempengaruhi pengungkapan CSR, penerapan GCG di suatu perusahaan juga sangat mempengaruhi kinerja keuangan. Adanya penerapan mekanisme GCG yang terdiri dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan institusional membuat sistem maupun tata kelola perusahaan menjadi baik, sehingga tidak hanya menjamin keputusan manajemen agar lebih efektif akan tetapi diharapkan dengan adanya penerapan GCG maka kinerja perusahaan akan sehat dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Implementasi GCG perlu didukung dengan adanya mekanisme GCG. Sistem hukum pemerintahan

yang menganut eropa kontinental mengharuskan perusahaan memiliki dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang berfungsi mengawasi segala kegiatan manajemen termasuk keputusan mengenai pengungkapan CSR. Fungsi dewan komisaris sangat penting bagi perusahaan mengingat perlu adanya organ perusahaan guna mengawasi kinerja manajemen termasuk keputusan-keputusan yang nantinya dapat berpengaruh pada perusahaan. Dewan komisaris yang menjadi proksi penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris yang terdapat di perusahaan. Proksi yang digunakan pada penelitian ini terkait dengan dimensi dewan komisaris adalah ukuran dewan komisaris. Akhtaruddin, *et al.*, 2009 mengemukakan bahwa keputusan yang dibuat oleh perusahaan terkait dengan pengungkapan CSR harus melalui formulasi yang dibuat oleh para dewan komisaris. Namun jika jumlah dewan komisaris semakin banyak maka akan mengurangi bentuk ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara manajemen dan *shareholder*. Di sisi lain Chen dan Jaggi (2000), dan Zahra, *et al.* (2000) mengemukakan bahwa banyaknya dewan komisaris di suatu perusahaan akan menimbulkan tingkat pengawasan yang lebih dibanding dengan jumlah dewan komisaris yang rendah. Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis 1a berarah positif sebagai berikut:

Hipotesis 1a: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Secara umum komisaris perusahaan terdiri dari anggota yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dipilih oleh *executive officers* dari perusahaan tersebut, sedangkan komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak terafiliasi (Akhtaruddin, *et al.* (2009). Komisaris yang berasal dari perusahaan yang tidak terafiliasi disebut dengan komisaris independen. Kosnik (1990) mengemukakan peran dari komisaris independen lebih efektif dibandingkan dengan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan netral terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh direksi (Surya dan Yustiavandana, 2006:135). Jika komisaris bersifat independen maka keputusan yang dihasilkan terkait dengan pengungkapan akan lebih bersifat netral atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis 1b yang memiliki arah positif sebagai berikut:

Hipotesis 1b: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Salah satu fungsi dari adanya komite audit adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern berjalan dengan baik (KNKG, 2006). Adanya sistem pengendalian intern yang baik dalam perusahaan membuat organ-organ di perusahaan baik antar manajer, komisaris, maupun organ lainnya menjadi terintegrasi sehingga hal ini dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi. Ketika masalah keagenan dapat diminimalisir maka diharapkan informasi terkait nilai-nilai sosial yang dibutuhkan oleh investor dapat diungkapkan secara penuh. Hal ini didukung oleh Forker (1992) yang mengemukakan bahwa komite audit sangat efektif sebagai alat pengawasan untuk dapat meningkatkan tingkat pengungkapan termasuk pengungkapan CSR. Oleh sebab itu, dirumuskan hipotesis 1c yang memiliki arah positif sebagai berikut:

Hipotesis 1c: komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Struktur kepemilikan dan penerapan GCG di suatu perusahaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dikarenakan struktur kepemilikan merupakan bagian dari keberhasilan mekanisme GCG di suatu perusahaan. Teori agensi (Eisenhardt, 1989, dan Jensen dan Meckling, 1976) menunjukkan bahwa manajer memiliki kekuatan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di perusahaan untuk menjamin saham agar tidak turun. McConnell dan Servaes (1990); Denis, *et al.* (1997) mengemukakan bahwa jika manajer sudah memiliki saham yang besar di perusahaan maka manajer cenderung untuk membuat keputusan yang memaksimalkan nilai pemegang saham termasuk keputusan dalam meningkatkan pengungkapan CSR. Oleh sebab itu, dapat dirumuskan hipotesis 1d yang berarah positif sebagai berikut:

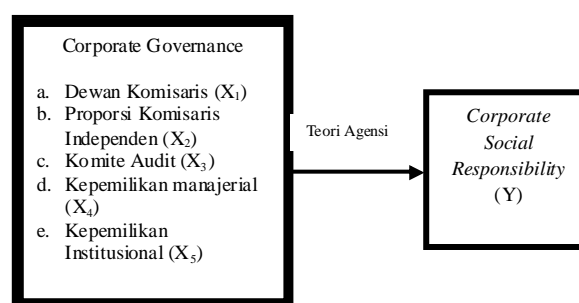
Hipotesis 1d: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional juga memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Aguilera, *et al.*, 2006; dan Denis and McConnell, 2003) yang menunjukkan bahwa para investor yang berasal dari pihak institusi lebih tertarik pada hasil jangka panjang dibanding dengan hasil jangka pendek dikarenakan investasi yang ditanamkan di perusahaan diharapkan tidak hanya menguntungkan pihak institusi dalam jangka pendek, namun lebih mengharapkan pada keuntungan jangka panjang.

Tidak terkecuali dengan pengungkapan CSR. Adanya pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan maka secara tidak langsung perusahaan melakukan investasi jangka panjang. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis 1e yang memiliki arah positif sebagai berikut:

Hipotesis 1e: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan perumusan hipotesis di atas maka dapat dibentuk pola hubungan kedua variabel. Pola hubungan kedua variabel dapat dilihat pada model penelitian yang disajikan dalam gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan paradigma positivis yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian secara kuantitatif dan melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur statistika. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan mengenai keterkaitan antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *corporate social responsibility* (CSR). Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian eksplanatori.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dipilih dengan teknik penyampelan bersasaran (*purposive sampling*). Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Pengukuran Variabel

Variabel Independen (X)

Dewan Komisaris (X₁)

Dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002; Akhtaruddin 2009).

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Observasi (Perusahaan)
Perusahaan yang termasuk ke dalam industri manufaktur selama tahun 2009-2011	139
Perusahaan manufaktur yang secara tidak konsisten memiliki laporan tahunan selama tahun 2009-2011	(74) 65
Tidak tersedianya data mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur selama tahun 2009-2011	(19) 46
Perusahaan manufaktur yang secara konsisten mendapatkan opini audit modifikasian selama tahun 2009-2011	(0) 46
Tidak tersedianya laporan GCG perusahaan manufaktur selama 2009-2011	(0)
Terpilih sebagai sampel	46 Perusahaan
Total Pengamatan = (sampel x n-tahun)	46 x 3 tahun = 138 sampel

Sumber: data diolah sendiri

Komisaris Independen (X_2)

Komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Chen dan Jaggi, 2000; dan Akhtaruddin, *et al.*, 2009).

Komite Audit (X_3)

Komite audit diukur dengan melihat total dari komite audit dalam suatu perusahaan (Bouaziz, 2012; Anderson, *et al.*, 2004).

Kepemilikan Manajerial (X_4)

Proksi yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial dengan melihat persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar (Soliman, *et al.*, 2012).

Kepemilikan Institusional (X_5)

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah dengan melihat persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar (Soliman, *et al.*, 2012).

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR dalam

penelitian ini diprosikan dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR berdasarkan Sembiring (2005). Instrumen pengukuran (CSRI) yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrument yang digunakan oleh Sembiring (2005).

Metode Analisis

Berdasarkan hipotesis yang telah diajukan, maka pada penelitian ini digunakan dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$CSR = \alpha_0 + \beta_1 DK + \beta_2 Ind + \beta_3 KA + \beta_4 KM + \beta_5 KI + e_1$$

Keterangan:

DK = Dewan komisaris
 Ind = Komisaris independen
 KA = Komite audit
 KM = Kepemilikan manajerial
 KI = Kepemilikan institusional
 CSR = Pengungkapan tanggung jawab sosial
 α = konstanta
 β_{1-5} = Koefisien regresi
 e_1 = Error

HASIL

Uji Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar diperoleh estimasi yang tidak bias meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Penjelasan hasil pengujian asumsi-asumsi tersebut adalah sebagai berikut:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan memperhatikan *p-value* pada persamaan. uji *Kolmogorov Smirnov* disajikan dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Normalita

Variabel Dependen	Unstandardized Residual	
	N	138
CSR	<i>KolmogorovSmimov</i>	1,287
	Asymp Sig	0,73

Sumber: Hasil Output SPSS 20 yang diolah

Keterangan:

CSR = Pengungkapan tanggung jawab sosial

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* untuk model regresi adalah 1,287 dan tidak signifikan pada 0,05 karena *p-value* sebesar 0,073 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Penelitian ini menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance* sebagai indikator ada atau tidaknya multikolinearitas diantara variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas disajikan dala tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Dependen	Variabel Independen	Colinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
CSR	Dewan Komisaris	0,807	1,240
	Komisaris Independen	0,955	1,048
	Komite Audit	0,912	1,096
	K. Manajerial	0,695	1,439
	K. Institusional	0,743	1,346

Sumber: Hasil Output SPSS 20 yang diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa kedua model regresi bebas dari adanya multikolinier. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai *variance inflation factor* (VIF) setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Selain itu, hasil perhitungan nilai *tolerance* juga dari setiap variabel independen tidak ada yang memiliki kurang dari 0,10.

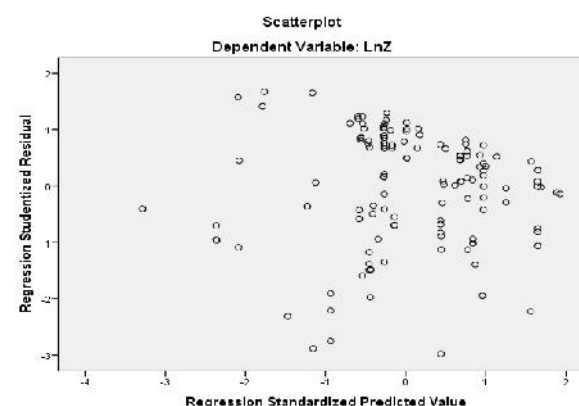
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 grafik *scatterplots* di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada

sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Hasil *run test* menunjukkan bahwa nilai test 0,06275 dengan probabilitas 0,124 adalah tidak



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Pertama

Sumber: Hasil Output SPSS 20 yang diolah

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	0,06275
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,124

Sumber: Hasil Output SPSS 20 yang diolah

signifikan pada 0,05. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa residual adalah acak tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

Hasil Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk mengestimasi hubungan kausal antara variabel independen terhadap dependen untuk menjawab permasalahan mengenai pengaruh antar variabel independen dan dependen. Berikut merupakan hasil uji regresi antara variabel GCG dan CSR.

beta -0,083 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dari nilai *p-value* sebesar 0,379 yang berarti koefisien beta dari kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR tidak signifikan. Pengaruh secara parsial dari kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR dilakukan dengan uji t. Hasil uji t untuk koefisien beta menyatakan

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Variabel Dependen	Variabel Independen	B	Koefisien Beta	<i>p-value</i>
Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR)	DK	0,075	0,069	0,432
	Ind	0,506*	0,306*	0,000
	KA	-1,335*	-0,332*	0,000
	KM	-0,017	-0,083	0,379
	KI	0,004	0,002	0,979
$R^2 = 0,184$		F = 5,933		
Adj. $R^2 = 0.153$		Signifikansi F = 0,000*		
* = Signifikansi pada probability = 0,05		= 1,312		

Tabel 5 menjelaskan hasil pengujian pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Pengaruh secara parsial dari dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR dilakukan dengan uji t. Hasil uji t untuk koefisien b menyatakan bahwa dewan komisaris dengan koefisien beta 0,069 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dari nilai *p-value* sebesar 0,432 yang berarti koefisien beta dari dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR signifikan. Pengaruh secara parsial dari komisaris independen terhadap pengungkapan CSR dilakukan dengan uji t. Hasil uji t untuk koefisien beta menyatakan bahwa komisaris independen dengan koefisien beta 0,306 berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dari nilai *p-value* sebesar 0,000 yang berarti koefisien beta dari komisaris independen terhadap pengungkapan CSR berpengaruh signifikan.

Pengaruh secara parsial dari komite audit terhadap pengungkapan CSR dilakukan dengan uji t. Hasil uji t untuk koefisien beta menyatakan bahwa komite audit dengan koefisien beta -1,335 berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dari nilai *p-value* sebesar 0,000 yang berarti koefisien beta dari komite audit terhadap pengungkapan CSR berpengaruh signifikan. Pengaruh secara parsial dari kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan CSR dilakukan dengan uji t. Hasil uji t untuk koefisien beta menyatakan bahwa kepemilikan dengan koefisien

bahwa kepemilikan institusional dengan koefisien beta 0,002 tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini terbukti dari nilai *p-value* sebesar 0,979 yang berarti koefisien beta dari kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR tidak signifikan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin, *et al.* (2009); Chen dan Jaggi (2000); Zahra, *et al.* (2000); Badjuri (2011) sehingga hipotesis 1_a tidak didukung. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan Cahyaningsih & Martina (2011) yang menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris di suatu perusahaan tidak menjadi jaminan bahwa perusahaan tersebut akan meningkatkan pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya dewan komisaris di suatu perusahaan seharusnya adanya bentuk *monitoring* oleh perusahaan dapat mengawasi jalannya kegiatan oleh manajemen. Hal ini juga dapat menjadi suatu indikasi bahwa pengangkatan dewan komisaris kurang efektif, sehingga dewan komisaris kurang begitu efektif dalam menjalankan fungsinya (Cahyaningsih & Martina, 2011).

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002); Forker (1992); Chen dan Jaggi (2000); Badjuri (2011) menunjukkan jika proporsi komisaris independen semakin besar maka berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan *voluntary* perusahaan sehingga hipotesis 1_b didukung. Hal ini menjadi suatu indikasi bahwa peran komisaris independen lebih efektif bila dibandingkan dengan komisaris yang berada dari dalam perusahaan (Kosnik, 1990). Penelitian ini dapat menjadi suatu kesimpulan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara signifikan memilih komisaris independen yang benar-benar independen, dalam arti menjalankan fungsinya sebagai pihak yang netral terhadap segala kebijakan yang dilakukan oleh direksi (Surya dan Yustiavandana, 2006:135).

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) yang menunjukkan bahwa jumlah komite audit dapat berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR sehingga hipotesis 1_c tidak didukung. Adanya hasil penelitian ini dapat menjadi suatu fenomena bahwa praktik GCG di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR di perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini menjadi suatu indikasi bahwa adanya komite audit di suatu perusahaan hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan dan menghindari sanksi yang ada. Faktor lain yang menjadi penyebab adanya komite audit justru dapat berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR dikarenakan pada pedoman GCG di Indonesia (KNKG, 2006), tidak terdapat kriteria yang ketat mengenai penunjukan anggota komite audit tersebut serta proses penunjukan komite audit masih belum jelas dan terbuka, sehingga independensi komite audit dalam perusahaan masih perlu dipertanyakan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sehingga hipotesis 1_d tidak didukung. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen selaku pemilik saham menganggap bahwa manfaat yang akan diterima dari adanya pengungkapan CSR lebih rendah dibandingkan jika perusahaan tersebut tidak mengungkapkan CSR. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi salah satunya adalah biaya investasi yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan manfaat yang diterimanya, sehingga hal ini memicu pihak manajemen untuk tidak mengandalkan informasi CSR sebagai dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2007). Berdasarkan hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung teori agensi. Manajemen tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam melakukan pengungkapan CSR, bahkan manajemen cenderung untuk tidak menggunakan informasi CSR sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Oleh sebab itu hipotesis 1_e tidak didukung. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Graves and Waddock (1994); Teoh and Shiu (1990); dan Soliman, *et al.*, (2012) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional tidak dapat berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen seperti yang diharapkan. Justru pihak institusi tidak memperdulikan informasi mengenai CSR, hal itu dianggap oleh pihak institusi sebagai informasi yang tidak menguntungkan bagi saham yang mereka tanamkan. Cahyaningsih dan Martina (2011) menyebutkan bahwa pihak institusi yang menanamkan sahamnya di perusahaan Indonesia masih sangat bergantung pada informasi moneter guna pengambilan keputusan, sehingga hal ini membuat beberapa penelitian di Indonesia termasuk penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningsih dan Martina (2011); Badjuri (2011) mengenai kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dan kinerja keuangan. Studi dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009–2011. Penelitian ini terdiri dari variabel GCG, pengungkapan CSR dan kinerja keuangan. Variabel GCG terbagi atas beberapa dimensi, yaitu dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan insitusalional. (2) Variabel pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan. Kemudian instrumen yang digunakan adalah instrumen yang telah digunakan oleh Sembiring (2005). (3) variabel kinerja keuangan menggunakan tobins'Q. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG yang diukur dengan dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun di sisi lain komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dapat menjadi suatu kesimpulan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara signifikan memilih komisaris independen yang benar-benar independen, dalam arti menjalankan fungsinya sebagai pihak yang netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh manajemen.

Keterbatasan

Terdapat sejumlah keterbatasan yang harus diperhatikan guna penelitian kedepannya.

Penilaian pengungkapan tanggung jawab sosial cenderung bersifat subjektif. Hal ini terjadi karena penafsiran setiap pembaca dalam melihat pengungkapan CSR di laporan tahunan akan berbeda terhadap standar yang digunakan.

Penilaian mengenai konsep CSR hanya sebatas pada pengungkapan tanggung jawab sosial bukan pada aktivitas sosial, sehingga jika perusahaan tidak memanfaatkan laporan tahunan sebagai dasar untuk menjelaskan seluruh aktivitas CSR selama satu tahun maka akan timbul kesenjangan antara aktivitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

DAFTAR RUJUKAN

Aguilera, R., Williams, C., Conley, J., and Rupp, D. 2007. *Corporate Governance and Social Responsibility*

ity: a comparative analysis of the UK and the US. *Corporate Governance. An International Review*. 14(3):147–158.

- Akhtaruddin, M., Hossain, M.A., Hossain, M., dan Yao, L. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firm. *JAMAR*. Vol. 7- Number 1 - 2009.
- Badjuri, A. 2011. Faktor-Faktor Fundamental, Mekanisme Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur dan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Mei 2011, Hal: 38–54 Vol. 3, No. 1
- Bhimani, A., and Soonawalla, K. 2005. From conformance to performance: The corporate responsibilities continuum. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24, 165–174.
- Bouaziz, Z. 2012. The Impact of the Presence of Audit Committees on the Financial Performance of Tunisian Companies. *IJMBS*. Vol. 2, ISSue 4, oct - Dec 2012.
- Cahyaningsih dan Martina, Venti, Y. 2011. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial. *Siasat Bisnis*. Vol 15 No.2 Juli 2011 Hal: 171–186.
- Chen, C.J.P., dan Jaggi, B. 2000. Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosure in Hongkong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(4), pp. 285–310.
- Denis, D.J., Denis, D.K., and Sarin, A. 1997. Agency Problems, Equity Ownership, and Corporate Diversification. *The Journal of Finance*. 52, 135–160.
- Denis, D.K., and Mcconnell, J.J. 2003. International Corporate Governance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1).
- Eisenhardt, K.M. 1989. "Agency Theory: An Assessment and Review". *Academy of Management Review*. Vol. 14. No.1. pp 57–74.
- Forker, J.J. 1992. "Corporate governance and disclosure quality", *Accounting and Business Research*, 22 (86), pp. 111–124.
- Gaffikin, M. 2006. *The Critique of Accounting Theory. Working Papers*. University of Wollongong.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, N.A.M. 2007. Ownership Structure And Corporate Social Responsibility Disclosure: Some Malaysian Evidence. *Corporate Governance*. Vol. 7 No. 3 2007, pp.251–266.
- Haniffa, R.M., and Cooke, T.E. 2002. Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus* 38 (3), 317–349.

- Jensen, M. 2002. Value Maximization, Stakeholder Theory, and The Corporate Objective Function. *Business Ethics Quarterly*, 12, 235–256.
- Jensen, M., and William, M. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jo, H., & Harjoto, M.A. 2012. The Causal Effect of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics* (2012) 06:53–72.
- Kosnik, R.D. 1990. "Effects of Board Demography and Directors' Incentive on Corporate Greenmail Decision", *Academy of Management Journal*, 33(1), pp. 129–150.
- Margolis, J.D., Elfenbein, H.A., and Walsh, J.P. 2007. Does it Pay to Be Good? A Meta-analysis And Redirection of Research on the Relationship Between Corporate Social and Financial Performance. Working Paper. *Harvard Business School*.
- McConnell, J., and Servaes, H. 1990. Additional Evidence On Equity Ownership And Corporate Value. *Journal of Financial Economics*, 27(2), 595–612.
- OECD. 2004. *Principles of Corporate Governance*. Head of Publications Service, OECD Publications Service, Paris Cedex, France.
- Sembiring, E.R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *SNA VIII Solo*, 15–16 September 2005.
- Soliman, M.M., and El Din, Mohamed, B. 2012. Ownership Structure And Corporate Social Responsibility (CSR): An Empirical Study of The Listed Companies in Egypt. *The International Journal of Social Sciences*. 15th Desember 2012. Vol 5 No 1.
- Surya, I., dan Yustiavandana, I. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Teoh, H.Y., and Shiu, G.Y. 1990. Attitudes Towards Corporate Social Responsibility and Perceived Importance of Social Responsibility Information Characteristics in A Decision Context. *Journal of Business Ethics*. 9, 71–77.
- Thompson, P., dan Zakaria, Z. 2004. Corporate Social Responsibility Reporting in Malaysia: Progress and Prospects. *The Journal of Corporate Citizenship*; Spring 2004; 13.
- Tsoi, J. 2009. Stakeholders' Perceptions and Future Scenarios to Improve Corporate Social Responsibility in HongKong and Mainland China. *Journal of Business Ethics* (2010) 91:391.
- Zahra, S.A. Neubaum, D.O., dan Huse, M. 2000. Entrepreneurship in medium-size company: exploring the effect of ownership and governance systems. *Journal of Management*, 26(5), pp. 947–97.